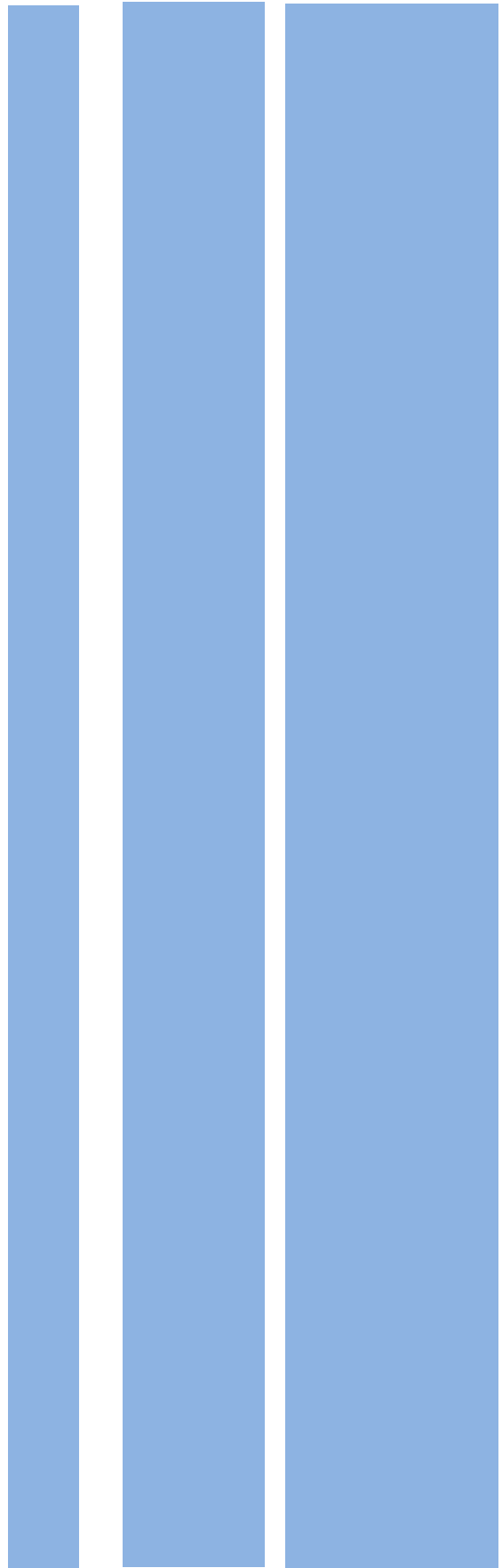


KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA UTARA (408767)

Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2022 (Unaudited)



Jalan Putri Hijau No. 4
Medan

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

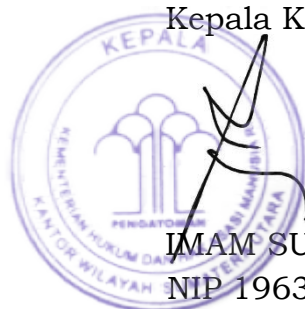
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Medan, 31 Desember 2022

Kepala Kantor Wilayah



IMAM SUYUDI

NIP 196312071987031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	4
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Laporan Operasional	7
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	24
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	44
F. Pengungkapan Penting Lainnya	47
VI. Lampiran dan Daftar	x

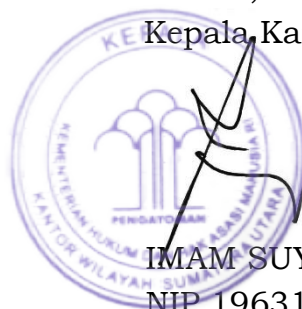
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Divisi Administrasi DIPA Sekretariat Jenderal yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Medan, 31 Desember 2022

Kepala Kantor Wilayah



IMAM SUYUDI

NIP 196312071987031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp20.435.455.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp30.582.216.519 atau mencapai 99,71 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp30.742.380.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2022. Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp148.675.813.454 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp24.649.150; Aset Tetap (neto) sebesar Rp148.588.729.297; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp62.435.007.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp148.675.813.454.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.435.307, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp22.291.266.222 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp22.270.830.915. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp148 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp22.270.830.767.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar

Rp140.974.519.391 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp22.270.830.767 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp30.407.614.292 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp149.111.302.916

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	20,435,455	0	-
JUMLAH PENDAPATAN		0	20,435,455	0	-
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	14,179,442,000	14,059,596,217	99.15%	13,576,918,042
Belanja Barang	B.4	6,947,720,000	6,935,503,139	99.82%	7,687,126,276
Belanja Modal	B.5	9,615,218,000	9,587,117,163	99.71%	1,455,082,800
JUMLAH BELANJA		30,742,380,000	30,582,216,519	99.71%	22,719,127,118

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3		
Piutang Bukan Pajak	C.4		
Bagian Lancar TP/TGR	C.5		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7		
Belanja Dibayar di Muka	C.8		
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9		
Persediaan	C.10	24,649,150	42,954,550
Jumlah Aset Lancar		24,649,150	42,954,550
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11		-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13		
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	123,560,016,000	123,950,141,000
Peralatan dan Mesin	C.15	16,795,589,829	15,275,358,073
Gedung dan Bangunan	C.16	16,886,186,000	16,978,875,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17		
Aset Tetap Lainnya	C.18	151,603,576	133,573,576
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	8,017,757,316	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(16,822,423,424)	(15,406,382,808)
Jumlah Aset Tetap		148,588,729,297	140,931,564,841
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	17,545,000	17,545,000
Aset Lain-Lain	C.22	353,295,716	260,606,716
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(308,405,709)	(278,151,716)
Jumlah Aset Lainnya		62,435,007	-
JUMLAH ASET		148,675,813,454	140,974,519,391
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24		-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25		
Pendapatan Diterima di Muka	C.26		
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	148,675,813,454	140,974,519,391
JUMLAH EKUITAS		148,675,813,454	140,974,519,391
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		148,675,813,454	140,974,519,391

III. LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	20,435,307	16,126,007
JUMLAH PENDAPATAN		20,435,307	16,126,007
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	14,059,596,217	13,576,918,042
Beban Persediaan	D.3	138,867,842	263,955,270
Beban Barang dan Jasa	D.4	4,112,486,183	4,923,838,223
Beban Pemeliharaan	D.5	1,023,175,593	1,150,873,900
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,679,278,921	1,432,316,553
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1,277,861,466	1,309,851,456
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		
JUMLAH BEBAN		22,291,266,222	22,657,753,444
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(22,270,830,915)	(22,641,627,437)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.11	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			115,999
Defisit Selisih Kurs		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	115,999
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		148	6,144,659
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		148	6,144,659
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		148	6,260,658
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(22,270,830,767)	(22,635,366,779)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(22,270,830,767)	(22,635,366,779)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	140,974,519,391	141,085,486,944
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(22,270,830,767)	(22,635,366,779)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(435,489,462)	2,251,016
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3		
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4		
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(435,489,462)	(376,052)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	30,407,614,292	22,522,148,210
EKUITAS AKHIR	E.5	148,675,813,454	140,974,519,391

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.007/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan koordinasi di bidang bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah dengan cakupan wilayah Provinsi Sumatera Utara. Melalui peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara berkomitmen dengan visi:

“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel, dan transparan melalui implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual yang diimplementasikan.
3. Mengembangkan sistem informasi yang andal dan terpercaya.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Semester II Tahun 2022 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - a. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - b. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak

Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Pengolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp22.448.226.000. Selama tahun 2022, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2022	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	13.800.894.000	14.179.442.000
Belanja Barang	7.865.332.000	6.947.720.000
Belanja Modal	782.000.000	9.615.218.000
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	22.448.226.000	30.742.380.000

Realisasi
Pendapatan
Rp335.000.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp20.435.455. Pendapatan Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN, Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	0	20.435.307	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	148	-
Jumlah	0	20.435.455	-

Realisasi Pendapatan TA 2022 mengalami penurunan 22,40 persen dibandingkan TA 2021. Hal ini disebabkan karena telah selesainya tindaklanjut kerugian negara pada Tahun Anggaran 2021 dan tidak adanya pengembalian belanja barang TAYL.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2022 dan 2021 (dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN		115.999	-
Pendapatan sewa tanah, deung dan bangunan	20.435.307	16.126.007	
Pendapatan penyelesaian kerugian negara		2.627.068	3,70
Pendapatan Kembali belanja pegawai TAYL	148	1.720.000	(50,00)
Pendapatan Kembali belanja barang TAYL		4.424.659	
Jumlah	20.435.455	25.013.733	(22,40)

Realisasi Belanja
Rp30.582.216.51
9

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara pada TA 2022 adalah sebesar Rp30.582.216.519 atau 99,48% dari anggaran belanja sebesar Rp30.742.380.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	14,179,442,000	14,059,596,217	0.00
Belanja Barang	6,947,720,000	6,935,503,139	99.82
Belanja Modal	9,615,218,000	9,587,117,163	0.00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00
Total Belanja	30,742,380,000	30,582,216,519	99.48

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar 34,61 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya Belanja Modal yang direalisasikan untuk rehabilitasi rumah negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.
2. Meningkatnya Belanja Pegawai seiring dengan penambahan jumlah pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	14,059,596,217	13,576,918,042	3.56
Belanja Barang	6,935,503,139	7,687,126,276	(9.78)
Belanja Modal	9,587,117,163	1,455,082,800	558.87
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	30,582,216,519	22,719,127,118	34.61

Belanja Pegawai
Rp14.059.596.217

7

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp14.059.596.217 dan Rp13.576.918.042. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 3,56 persen dari TA 2021. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penerimaan PNS pada tahun 2022.
2. Adanya penambahan jumlah pegawai PNS yang berasal dari mutasi masuk pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	13,947,821,964	13,447,874,350	3.72
Belanja Honorarium			#DIV/0!
Belanja Lembur	127,163,000	133,611,000	(4.83)
Belanja Vakasi			#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	14,074,984,964	13,581,485,350	3.63
Pengembalian Belanja Pegawai	15,388,747	4,567,308	236.93
Jumlah Belanja	14,059,596,217	13,576,918,042	3.56

Belanja Barang
Rp6.935.503.139

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.935.503.139 dan Rp7.687.126.276. Realisasi Belanja Barang TA 2022 mengalami penurunan 9,78% dari Realisasi Belanja Barang TA 2021. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Penurunan belanja jasa terutama pada sewa kendaraan dinas pejabat sebanyak 10 unit pada tahun 2021 menjadi 6 unit pada tahun 2022. Penurunan belanja jasa juga disebabkan karena tidak adanya kegiatan penerimaan CPNS di Tahun 2022;
2. Penurunan belanja barang persediaan disebabkan karena pagu anggaran yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	Realisasi TA 2022	Realisasi TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2,101,644,118	1,773,131,610	18.53
Belanja Barang Non Operasional	707,028,682	637,501,504	10.91
Belanja Barang Persediaan	126,994,142	171,147,600	(25.80)
Belanja Jasa	1,303,813,383	2,513,205,109	(48.12)
Belanja Pemeliharaan	1,016,743,893	1,159,823,900	(12.34)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1,679,278,921	1,432,316,553	17.24
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.			
Jumlah Belanja Kotor	6,935,503,139	7,687,126,276	(9.78)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	6,935,503,139	7,687,126,276	(9.78)

Belanja Modal
Rp9.587.117.163

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.587.117.163 dan Rp1.455.082.800. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar 558,87% dibandingkan TA 2021 disebabkan karena adanya realisasi anggaran rehabilitasi rumah negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,133,870,385	1,455,082,800	(22.08)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8,453,439,778	0	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00
Belanja Modal BLU	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	9,587,310,163	1,455,082,800	558.88
Pengembalian	193,000	0	0.00
Jumlah Belanja	9,587,117,163	1,455,082,800	558.87

Belanja Modal Tanah Rp0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada kenaikan ataupun penurunan dibandingkan realisasi TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Modal Tanah	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp1.133.870.385

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 adalah sebesar Rp1.133.870.385, mengalami penurunan sebesar 22,08 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp1.455.082.800.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI T.A. 2022	REALISASI T.A. 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,133,870,385	1,455,082,800	-22.08
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal BLU	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	1,133,870,385	1,455,082,800	0.00
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah Belanja	1,133,870,385	1,455,082,800	-22.08

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp8.453.246.778

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.453.246.778 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan Realisasi TA 2021. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari rehabilitasi rumah dinas negara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Renovasi Rumah Dinas negara Kantor Wilayah	8.453.439.778	0	-
Jumlah Belanja Kotor	8.453.439.778	0	-
Pengembalian Belanja Modal	193.000	-	-
Jumlah Belanja Modal	8.453.246.778	0	-

Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2022 dan TA 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada kenaikan ataupun penurunan dibandingkan realisasi TA 2021

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Modal Jaringan	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	-

Belanja Bantuan
Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak ada kenaikan ataupun penurunan dibandingkan realisasi TA 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang	0		-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	-

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

Rp24.649.150

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp24.649.150 dan Rp42.954.550.

Aset Lancar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ini berupa barang persediaan.

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Uang Tunai	0	0
Bank BNI No. Rek. 0322334416	0	0
Jumlah	0	0

Kas di Bendahara

Penerimaan

Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0,.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan

Setara Kas

Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2022	Tahun 2021
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Piutang PNPB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) Rp0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp2.627.068.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.	Teti Winarti	0	2.627.068
2.			
	Jumlah	0	2.627.068

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam

waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.			
2.			
	Jumlah		

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jk. Pendek Rp0*

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Pendek*

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Bagian Lancar TPA			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

*Beban Dibayar di Muka
Rp0*

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
Pembayaran Internet	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah	0	0

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp5.200.000 dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus
Diterima TA 2022 dan 2021*

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2022	Tahun 2021
Pendapatan Jasa Pelatihan	0	0
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan
Rp24.649.150

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp24.649.150 dan Rp45.524.550 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2022 dan 2021

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2022	Tahun 2021
Barang Konsumsi	24.144.150	45.524.550
Barang untuk Pemeliharaan	505.000	
Suku Cadang		
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		
Persediaan Lainnya		
Jumlah	24.649.150	45.524.550

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp148.588.729.927

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp148.588.729.927 dan Rp140.931.564.841.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

Rp123.560.016.000

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp123.560.016.000 dan Rp123.950.141.000.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	123.950.141.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Mutasi Kurang:	
Revaluasi Aset	0
Koreksi Semu	390.125.000
Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2022	123.560.016.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	123.560.016.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Luas	Keterangan	Nilai
1	5.485m ²	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	66.592.474.000
2	7.210m ²	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	56.967.542.000
Jumlah			123.560.016.000

Peralatan dan Mesin

Rp16.795.589.829

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp16.795.589.829 dan Rp15.275.358.073.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	15.275.358.073
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.133.870.385
Hibah	
Transfer Masuk	5.212.451.371
Koreksi Tambah	
Mutasi Kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	(92.689.000)
Transfer Keluar	(5.009.840.000)
Saldo Per 31 Desember 2022	16.519.150.829
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(958.268.416)
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	16.795.589.829

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut:

Pembelian peralatan dan mesin berupa computer, kamera digital, generating set, Air Conditioner dll senilai Rp1.133.870.835

Transfer Masuk berupa kendaraan roda 4, PC, Laptop, Hub, Switch, printer senilai Rp 5.238.231.371

Mutasi kurang merupakan penghentian penggunaan sebuah mesin genset yang sudah dalam kondisi rusak berat senilai Rp92.689.000 dan direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya.

Transfer keluar berupa rak besi, lapotp dan switch.

Gedung dan Bangunan

Rp16.886.186.000

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp16.886.186.000 dan Rp16.978.875.000.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2022

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	16.978.875.000
Mutasi tambah:	
Pembangunan Gedung	
Mutasi Kurang:	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	(92.689.000)
Saldo Per 31 Desember 2022	16.886.186.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	16.886.186.000

Mutasi kurang berasal dari penghentian aset dari penggunaan berupa gedung garasi dan pagar permanen.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp0

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	0
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	0
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo Per 31 Desember 2022	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	0

Aset Tetap Lainnya
Rp151.603.576

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp151.603.576 dan Rp133.573.576 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	133.573.576
Mutasi tambah:	
- Transfer masuk	18.030.000
Mutasi Kurang:	
-	-
Saldo Per 31 Desember 2022	151.603.576
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	151.603.576

Mutasi tambah berupa transfer masuk berupa monografi dari BPHN

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp8.017.757.316

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp8.017.757.316 dan Rp0 yang merupakan rehabilitasi rumah dinas negara Kantor Wilayah yang proses pengerjaannya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Pembangunan gedung tersebut sesuai Kontrak No.W.2.-PB.02.01-28861 tanggal 14 Oktober 2022 dengan nilai Rp7.640.166.000 dengan sumber dana rupiah murni. Pada tanggal pelaporan penyelesaian gedung tersebut telah mencapai 90%.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp16.822.423.424

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp16.822.423.424 dan Rp15.406.382.808.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	16.795.589.829	14.057.043.264	2.738.546.565
2.	Gedung dan Bangunan	16.886.186.000	2.765.380.160	14.120.805.840
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4.	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Jumlah	33.681.775.829	16.822.423.424	16.859.352.405

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka Panjang
Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.		0	0
2.			
	Jumlah	0	0

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian TPA untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang TPA TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021
1.		0	0
2.			
	Jumlah	0	0

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Panjang TA 2022*

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Tagihan TPA			
Lancar	0	0,5%	0
Kurang Lancar	0	10%	0
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Aset Lainnya
Rp151.603.576

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp151.603.576 dan Rp133.573.576.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud
Rp17.545.000

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp17.545.000 dan Rp17.545.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	17.545.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Saldo Per 31 Desember 2022	17.545.000
Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	17.545.000

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Sms Gateway pada Divisi Imigrasi	17.545.000
2.		
	Jumlah	17.545.000

Aset Lain-Lain
Rp353.295.716

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp353.295.716 dan Rp260.606.716. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera

Utara. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	260.606.716
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	
Saldo Per 31 Desember 2022	353.295.716
Amortisasi s.d. 31 Desember 2022	
Nilai Buku Per 31 Desember 2022	353.295.716

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp308.405.709

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp308.405.709 dan Rp278.151.716. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2022

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	Software	17.545.000	17.545.000	-
	Jumlah			
B.	Aset Lain-lain	353.295.716	290.860.709	62.435.007
	Jumlah			
	Total	370.840.716	308.405.709	62.435.007

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka Pendek Rp0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Utang Muka dari KPPN
Rp0

C.5.1. Utang Muka dari KPPN

Utang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp0

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	0
2.	Potongan Pajak yang belum disetor	0
3.	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
Total		0

Pendapatan Jasa Giro merupakan bunga bank pada rekening penampungan lainnya yang belum terdaftar pada *Treasury Notional Pooling (TNP)* dan belum disetorkan ke kas negara per tanggal pelaporan.

Potongan Pajak merupakan pungutan pajak bendahara pengeluaran atas transaksi Uang Persediaan yang belum disetorkan ke kas Negara per tanggal pelaporan..

Pendapatan Diterima di
Muka Rp0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
	0
Jumlah	0

*Beban yang Masih
Harus Dibayar Rp0*

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2022 dan 2021
(dalam rupiah)*

Uraian	2022	2021
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	0
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
Jumlah	0	0

*Ekuitas
Rp149.111.302.916*

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp149.111.302.916 dan Rp140.974.519.391. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP
Rp20.435.455

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp20.435.455 dan Rp25.013.733. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN	20.435.307	16.242.006	25,81
Pendapatan Penyelesaian Kerugian Negara		2.627.068	-
Pendapatan Lain-lain	148	6.144.659	-
Jumlah	20.435.455	25.013.733	18,30

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan Iuran Badan usaha, pendapatan pendidikan dan Pendapatan Lain-Lain yang merupakan pengembalian belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

Beban Pegawai
Rp14.059.596.217

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp14.059.596.217 dan Rp13.581.485.350. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	9,555,146,820	9,177,808,520	3.95
Beban Pembulatan Gaji PNS	159,991	154,171	3.64
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	595,252,046	565,209,446	5.05
Beban Tunj. Anak PNS	173,858,568	163,428,176	6.00
Beban Tunj. Struktural PNS	436,625,000	436,680,000	(0.01)
Beban Tunj. Fungsional PNS	779,762,000	616,885,000	20.89
Beban Tunj. PPh PNS	29,145,452	30,181,797	(3.56)
Beban Tunj. Beras PNS	519,758,340	497,670,240	4.25
Beban Uang Makan PNS	1,588,675,000	1,686,587,000	(6.16)
Beban Tunjangan Umum PNS	254,050,000	273,270,000	(7.57)
Beban Uang Lembur	127,163,000	133,611,000	(5.07)
Jumlah	14,059,596,217	13,581,485,350	3.40

Beban Persediaan
Rp160.677.842

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp160.677.842 dan Rp274.957.270. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan konsumsi	138,867,842	263,955,270	(90.08)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	21,810,000	11,002,000	49.56
Jumlah Beban Persediaan	160,677,842	274,957,270	(71.12)

Beban Barang dan
Jasa
Rp4.112.486.183

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp4.112.486.183 dan Rp4.923.838.223. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban-beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian aset sehingga tidak dilakukan penyewaan.

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1,812,296,329	1,254,274,350	30.79
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17,913,600	22,418,570	-25.15
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	238,520,000	228,540,000	4.18
Beban Barang Operasional Lainnya	16,935,000	257,100,600	-1418.16
Beban Barang Non-Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	15,979,189	10,798,090	32.42
Beban Bahan	407,421,682	482,091,500	-18.33
Beban Honor Output Kegiatan	50,100,000	33,760,000	32.61
Beban Barang Non Operasional Lainnya	209,559,000	40,145,000	80.84
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	39,948,000	81,505,004	-104.03
Beban Langganan Listrik	412,213,475	391,390,436	5.05
Beban Langganan Telepon	18,000,000	15,726,673	12.63
Beban Langganan Air			#DIV/0!
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya			#DIV/0!
Beban Jasa Pos dan Giro			#DIV/0!
Beban Sewa	838,399,908	2,084,772,000	-148.66
Beban Jasa Profesi	10,800,000	19,500,000	-80.56
Beban Jasa Lainnya	22,600,000		100.00
Beban Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	1,800,000	1,816,000	-0.89
Jumlah	4,112,486,183	4,923,838,223	-19.73

*Beban
Pemeliharaan
Rp1.001.365.593*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.001.365.593 dan Rp1.139.871.900. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan

TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	511,182,000	607,281,100	-15.82
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	490,183,593	532,590,800	-7.96
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan			
Beban Persediaan suku cadang			
Jumlah	1,001,365,593	1,139,871,900	-12.15

*Beban Perjalanan Dinas
Rp1.679.278.921*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.679.278.921 dan Rp1.432.316.553. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1,631,578,921	1,228,850,553	32.77
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	47,700,000	203,466,000	-76.56
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			
Beban Perjalanan Dinas- Penanganan Pandemi Covid-19			
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota			
Jumlah	1,679,278,921	1,432,316,553	17.24

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	-
Jumlah Beban	0	0	-

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	0	0	-
Jumlah Beban	0	0	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp670.369.048

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp670.369.048 dan Rp522.191.548. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	789,835,273	821,825,268	(3.89)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	485,275,830	488,026,188	(0.56)
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	-	
Beban Penyusutan Irigasi	0.	-	
Beban Penyusutan Jaringan	0.	-	
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	2,750,363.		-
Jumlah Penyusutan	1,277,861,466	1,309,851,456	
Beban Amortisasi Software	-	-	
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-		
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	
Jumlah Amortisasi	-	-	
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,277,861,466	1,309,851,456	(2.44)

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	0	0	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	0	0	-
Jumlah Beban	0	0	-

Kegiatan Non Operasional Rp148

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2021	%
Pengembalian atas belanja TAYL	148	6.260.658	-
Jumlah Beban	148	6.260.658	-

Pos Luar Biasa
Nihil

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2022 dan 2021.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp140.974.519.391

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp140.974.519.391 dan Rp141.085.486.944.

Defisit LO
Rp22.270.830.767

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah defisit sebesar Rp22.270.830.767 dan Rp22.635.830.767. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0
Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0.

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2022

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.		0
2.		0
Jumlah		0

Selisih Revaluasi Aset Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp435.489.462

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp435.489.462 dan Rp376.502.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi nilai Aset Tetap Non Revaluasi	443.239.462
Koreksi nilai aset lainnya non Revaluasi	(7.750.000)
Jumlah	435.489.462

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Lain-lain TA 2022

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

Transaksi Antar
Entitas
Rp30.407.614.292
2

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp30.407.614.292 dan Rp22.522.148.210.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas TA 2022

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(20.435.455)
Ditagihkan ke Entitas Lain	30.582.216.519
Transfer Masuk	235.958.228
Transfer Keluar	(390.125.000)
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	30.407.614.292

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2022, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp0.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp5.238.231.371 terdiri dari:

Transfer Masuk TA 2022

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	Biro Umum, Ditjen Imigrasi,	5.220.201.371
2.	Aset Tetap Lainnya	BPHN	18.030.000
Jumlah			5.238.231.371

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp5.409.965.000.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Pengesahan Hibah Langsung TA 2022

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.			0
2.			0
Total Pengesahan			0
Pengesahan Pengembalian Hibah			0
Jumlah			0

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2022 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Ekuitas Akhir
Rp148.675.813.4
54

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp148.675.813.454 dan Rp140.975.519.391.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Pengungkapan Lain-lain

A. Pengelola Keuangan

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-07.KU.03.03 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan KPA atas nama Imam Suyudi NIP.196312071987031001.

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Nomor: W2.KU.03.01-17 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 tanggal 03 Januari 2022 menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen DIPA AHU (408762) atas nama Maraulina NIP.197712312008042001

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Nomor:W2.KU.03.01-10 Tahun 2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara tanggal 03 Januari 2022 menetapkan Bendahara Pengeluaran atas nama Aditya Nugraha NIP.199111082012121002

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Nomor:W2.KU.03.01-13523 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: W.2.-KU.03.01-10 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara tanggal 03 Januari 2022 menetapkan Bendahara Pengeluaran atas nama Agung Ginting MP NIP.199812312017121002.

B. Penjelasan Capaian Output Strategis

Selama periode Tahun Anggaran 2022, output strategis yang telah dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sebagai berikut:

1. Layanan BMN tercapai 100%;
2. Layanan Hubungan Masyarakat tercapai 100%;

3. Layanan Protokoler tercapai 100%;
4. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal tercapai 100%;
5. Layanan Perkantoran tercapai 100%;
6. Layanan Saran Internal tercapai 100%;
7. Layanan Prasarana Internal tercapai 100%;
8. Layanan Manajemen SDM tercapai 100%;
9. Layanan Perencanaan dan Penganggaran tercapai 100%;
10. Layanan Pemantauan dan Evaluasi tercapai 100%;
11. Layanan Manajemen Keuangan tercapai 100%;
12. Layanan Reformasi Kinerja tercapai 100%.

Secara rinci, output atas program dukungan manajemen tersebut, dapat kami sampaikan dalam table di bawah ini:

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Output Keluaran	Progres Capaian Output
1	1558. EBA.956	Layanan BMN	200.766.000	200.548.362	99,89%	1	1	100%
2	1558. EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	373.802.000	373.712.700	99,98%	1	1	100%
3	1558. EBA.959	Layanan Protokoler	77.910.000	77.835.540	99,9%	1	1	100%
4	1558. EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	20.404.000	19.104.460	93,63%	1	1	100%
5	1558. EBA.994	Layanan Perkantoran	19.124.234.000	19.018.677.968	99,45%	1	1	100%
6	1558. EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.136.330.000	1.133.870.385	99,78%	49	49	100%
7	1558. EBB.971	Layanan Prasarana Internal	8.478.888.000	8.453.439.778	99,7%	1	1	100%
8	1558. EBC.954	Layanan Manajemen SDM	480.344.000	476.514.253	99,2%	203	203	100%
9	1558. EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	436.216.000	432.404.431	99,13%	1	1	100%
10	1558. EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10.528.000	10.459.000	99,34%	1	1	100%
11	1558. EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	202.786.000	202.583.000	99,9%	1	1	100%
12	1558. EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	200.172.000	198.648.389	99,24%	1	1	100%

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : SEKRETARIAT JENDERAL 01
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN 408767

Waktu Olap: 2023-02-21 07:05:45.0 [B@6f3f2d48
 Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 21/02/23 9:02 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --SAKTI

NO	URAIAN	2022				2021			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	30,742,380,000	30,582,216,519	160,163,481	99	23,141,783,000	22,719,127,118	422,655,882	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2022 DAN 2021
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 01

SEKRETARIAT JENDERAL

KDUAPPAW : 013010700KD

BA(013) ES1(01) SUMATERA UTARA

KODE SATKER : 408767

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN

Tgl Data 21/02/23 7:07 AM

Tgl. Cetak 21/02/2023 9:01 AM

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2022	2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	24,649,150	42,954,550	(18,305,400)	(42.62)
JUMLAH ASET LANCAR	24,649,150	42,954,550	(18,305,400)	(42.62)
ASET TETAP				
Tanah	123,560,016,000	123,950,141,000	(390,125,000)	(0.31)
Peralatan dan Mesin	16,795,589,829	15,275,358,073	1,520,231,756	9.95
Gedung dan Bangunan	16,886,186,000	16,978,875,000	(92,689,000)	(0.55)
Aset Tetap Lainnya	151,603,576	133,573,576	18,030,000	13.50
Konstruksi Dalam Pengerjaan	8,017,757,316	0	8,017,757,316	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(16,822,423,424)	(15,406,382,808)	(1,416,040,616)	9.19
JUMLAH ASET TETAP	148,588,729,297	140,931,564,841	7,657,164,456	5.43
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	17,545,000	17,545,000	0	0.00
Aset Lain-lain	353,295,716	260,606,716	92,689,000	35.57
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(308,405,709)	(278,151,716)	(30,253,993)	10.88
JUMLAH ASET LAINNYA	62,435,007	0	62,435,007	
JUMLAH ASET	148,675,813,454	140,974,519,391	7,701,294,063	5.46

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	148,675,813,454	140,974,519,391	7,701,294,063	5.46
JUMLAH EKUITAS	148,675,813,454	140,974,519,391	7,701,294,063	5.46
JUMLAH EKUITAS	148,675,813,454	140,974,519,391	7,701,294,063	5.46
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	148,675,813,454	140,974,519,391	7,701,294,063	5.46

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 408767
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SUMATERA UTARA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA
UTARA DI MEDAN

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 21/02/23 9:02 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
Tgl Data : 21/02/23 7:08 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	20,435,307	16,126,007	4,309,300	26.723
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	20,435,307	16,126,007	4,309,300	26.723
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	20,435,307	16,126,007	4,309,300	26.723
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	14,059,596,217	13,576,918,042	482,678,175	3.555
Beban Persediaan	138,867,842	263,955,270	(125,087,428)	(47.39)
Beban Barang dan Jasa	4,112,486,183	4,923,838,223	(811,352,040)	(16.478)
Beban Pemeliharaan	1,023,175,593	1,150,873,900	(127,698,307)	(11.096)
Beban Perjalanan Dinas	1,679,278,921	1,432,316,553	246,962,368	17.242
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 408767
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SUMATERA UTARA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA
UTARA DI MEDAN

Kode Lap : LO.SAT
Tanggal : 21/02/23 9:02 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lo_satker --SAKTI
Tgl Data : 21/02/23 7:08 AM

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,277,861,466	1,309,851,456	(31,989,990)	(2.442)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	22,291,266,222	22,657,753,444	(366,487,222)	(1.617)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(22,270,830,915)	(22,641,627,437)	370,796,522	(1.638)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	115,999	(115,999)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	115,999	(115,999)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	148	6,144,659	(6,144,511)	(99.998)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	148	6,144,659	(6,144,511)	(99.998)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	148	6,260,658	(6,260,510)	(99.998)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(22,270,830,767)	(22,635,366,779)	364,536,012	(1.61)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(22,270,830,767)	(22,635,366,779)	364,536,012	(1.61)

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
ESELON I : 01 **SEKRETARIAT JENDERAL**
WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 408767 **KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN**

Tgl Data : 21/02/23 7:09 AM
Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 21/02/23 9:02 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --SAKTI

URAIAN	2022	2021	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	140,974,519,391	141,085,486,944	(110,967,553)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(22,270,830,767)	(22,635,366,779)	364,536,012	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(435,489,462)	2,251,016	(437,740,478)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(435,489,462)	(376,052)	(435,113,410)	-
LAIN-LAIN	0	2,627,068	(2,627,068)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	30,407,614,292	22,522,148,210	7,885,466,082	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	7,701,294,063	(110,967,553)	7,812,261,616	-
EKUITAS AKHIR	148,675,813,454	140,974,519,391	7,701,294,063	-

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 408767
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SUMATERA UTARA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 01/02/23 3:39 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 1/2/23 2:19 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	9,001,862,000	9,564,599,000	9,555,146,820	0	9,555,146,820	99.9	9,452,180
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	123,000	165,000	163,738	3,747	159,991	99.24	5,009
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	885,037,000	595,302,000	595,252,046	0	595,252,046	99.99	49,954
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	154,289,000	173,949,000	173,858,568	0	173,858,568	99.95	90,432
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	417,040,000	436,625,000	436,625,000	0	436,625,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	464,800,000	779,765,000	779,762,000	0	779,762,000	100	3,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	26,499,000	29,177,000	29,145,452	0	29,145,452	99.89	31,548
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	446,894,000	520,000,000	519,758,340	0	519,758,340	99.95	241,660
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,997,160,000	1,664,400,000	1,588,675,000	0	1,588,675,000	95.45	75,725,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	267,820,000	276,090,000	269,435,000	15,385,000	254,050,000	97.59	22,040,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	13,661,524,000	14,040,072,000	13,947,821,964	15,388,747	13,932,433,217	99.34	107,638,783
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	139,370,000	139,370,000	127,163,000	0	127,163,000	91.24	12,207,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	139,370,000	139,370,000	127,163,000	0	127,163,000	91.24	12,207,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	13,800,894,000	14,179,442,000	14,074,984,964	15,388,747	14,059,596,217	99.26	119,845,783
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,869,400,000	1,812,781,000	1,812,296,329	0	1,812,296,329	99.97	484,671
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,200,000	17,940,000	17,913,600	0	17,913,600	99.85	26,400
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	222,720,000	238,520,000	238,520,000	0	238,520,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	16,500,000	16,940,000	16,935,000	0	16,935,000	99.97	5,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	18,000,000	16,000,000	15,979,189	0	15,979,189	99.87	20,811
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,130,820,000	2,102,181,000	2,101,644,118	0	2,101,644,118	99.97	536,882
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	739,394,000	411,138,000	407,421,682	0	407,421,682	99.1	3,716,318
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	44,600,000	50,100,000	50,100,000	0	50,100,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	277,600,000	209,637,000	209,559,000	0	209,559,000	99.96	78,000
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	50,400,000	39,948,000	39,948,000	0	39,948,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,111,994,000	710,823,000	707,028,682	0	707,028,682	99.47	3,794,318
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	109,445,000	100,010,000	99,994,340	0	99,994,340	99.98	15,660
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	47,513,000	27,078,000	26,999,802	0	26,999,802	99.71	78,198

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 408767
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SUMATERA UTARA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 01/02/23 3:39 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 1/2/23 2:19 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	156,958,000	127,088,000	126,994,142	0	126,994,142	99.93	93,858
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	480,000,000	412,224,000	412,213,475	0	412,213,475	100	10,525
522112	Belanja Langganan Telepon	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	100	0
522141	Belanja Sewa	925,300,000	838,520,000	838,399,908	0	838,399,908	99.99	120,092
522151	Belanja Jasa Profesi	36,900,000	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	18,600,000	23,140,000	22,600,000	0	22,600,000	97.67	540,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	73,962,000	2,297,000	1,800,000	0	1,800,000	78.36	497,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,552,762,000	1,304,981,000	1,303,813,383	0	1,303,813,383	99.91	1,167,617
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	442,818,000	511,182,000	511,182,000	0	511,182,000	100	0
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	100	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	500,250,000	490,218,000	490,183,593	0	490,183,593	99.99	34,407
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,900,000	5,382,000	5,378,300	0	5,378,300	99.93	3,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	956,968,000	1,016,782,000	1,016,743,893	0	1,016,743,893	100	38,107
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,738,398,000	1,638,077,000	1,631,578,921	0	1,631,578,921	99.6	6,498,079
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	203,700,000	47,788,000	47,700,000	0	47,700,000	99.82	88,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13,732,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,955,830,000	1,685,865,000	1,679,278,921	0	1,679,278,921	99.61	6,586,079
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	7,865,332,000	6,947,720,000	6,935,503,139	0	6,935,503,139	99.82	12,216,861
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	782,000,000	1,136,330,000	1,133,870,385	0	1,133,870,385	99.78	2,459,615
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	782,000,000	1,136,330,000	1,133,870,385	0	1,133,870,385	99.78	2,459,615
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	8,478,888,000	8,453,439,778	193,000	8,453,246,778	99.7	25,641,222
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	8,478,888,000	8,453,439,778	193,000	8,453,246,778	99.7	25,641,222
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	782,000,000	9,615,218,000	9,587,310,163	193,000	9,587,117,163	99.71	28,100,837
	JUMLAH BELANJA	22,448,226,000	30,742,380,000	30,597,798,266	15,581,747	30,582,216,519	99.53	160,163,481

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 408767

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SUMATERA UTARA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 01/02/23 3:39 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251 425131	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	20,435,307	0	20,435,307	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	20,435,307	0	20,435,307	
4259 425911	Pendapatan Lain-Lain Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	148	0	148	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	148	0	148	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	20,435,455	0	20,435,455	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	20,435,455	0	20,435,455	

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 2022
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 408767

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SUMATERA UTARA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN

Tgl Data 21/02/23 6:59 AM

Tgl. Cetak 21/02/2023 9:02 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	24,144,150	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	505,000	0
0.0	131111	Tanah	123,560,016,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	16,795,589,829	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	16,886,186,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	151,603,576	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	8,017,757,316	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	14,057,043,264
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,765,380,160
0.0	162151	Software	17,545,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	353,295,716	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	290,860,709
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	17,545,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	30,582,216,519
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	20,435,455	0
0.0	313211	Transfer Keluar	390,125,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	235,958,228
0.0	391111	Ekuitas	0	140,974,519,391
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	427,739,462	0
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	7,750,000	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	20,435,307
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	148
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	9,555,146,820	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	159,991	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	595,252,046	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	173,858,568	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	436,625,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	779,762,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	29,145,452	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	519,758,340	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,588,675,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	254,050,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	127,163,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,812,296,329	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17,913,600	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	238,520,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	16,935,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	15,979,189	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 2022
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
 UNIT ORGANISASI : 01
 WILAYAH/PROVINSI : 0700
 SATUAN KERJA : 408767

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 SEKRETARIAT JENDERAL
 SUMATERA UTARA
 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN

Tgl Data 21/02/23 6:59 AM

Tgl. Cetak 21/02/2023 9:02 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Beban Bahan	407,421,682	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	50,100,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	209,559,000	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	39,948,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	412,213,475	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	18,000,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	838,399,908	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	10,800,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	22,600,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,800,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	511,182,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	490,183,593	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	1,631,578,921	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	47,700,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	789,835,273	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	485,275,830	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2,750,363	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	138,867,842	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	21,810,000	0
JUMLAH			188,943,958,726	188,943,958,726

**NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2022
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 408767

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SUMATERA UTARA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN

Tgl Data 21/02/23 7:06 AM

Tgl. Cetak 21/02/2023 9:02 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	30,582,216,519
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	20,435,455	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	20,435,307
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	148
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	9,555,146,820	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	163,738	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	3,747
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	595,252,046	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	173,858,568	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	436,625,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	779,762,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	29,145,452	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	519,758,340	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,588,675,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	269,435,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	15,385,000
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	127,163,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,812,296,329	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17,913,600	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	238,520,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	16,935,000	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	15,979,189	0
3.0	521211	Belanja Bahan	407,421,682	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	50,100,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	209,559,000	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	39,948,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	99,994,340	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	26,999,802	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	412,213,475	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	18,000,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	838,399,908	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	10,800,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	22,600,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,800,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	511,182,000	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10,000,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	490,183,593	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,378,300	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 408767

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SUMATERA UTARA
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN

Tgl Data 21/02/23 7:06 AM

Tgl. Cetak 21/02/2023 9:02 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,631,578,921	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47,700,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,133,870,385	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	8,453,439,778	0
3.1	533121	Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	193,000
JUMLAH			30,618,233,721	30,618,233,721